

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL)**



TUGAS AKHIR

**OLEH :
DENIS SETIAWAN
NIM 18030244**

**POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA
PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA
TEGAL)

oleh mahasiswa :

Nama : Denis Setiawan

NIM : 18030244

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 28 Juli 2021

Pembimbing I,



ANDRI WIDIANTO, SE,M.Si
NIPY.04.015.212

Pembimbing II,



YUSRI ANIS F,SE,M.Si
NIPY. 09.015.242

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA
TEGAL)

Oleh :

Nama : Denis Setiawan

NIM : 18030244

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertimbangkan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal

Tegal, 30 Juli 2021

1. Andri Widiyanto, SE, M.Si
Ketua Sidang
2. Hetika, S.Pd, M.Si, Ak, CAAT
Penguji I
3. Dewi Sulistyowati, SE, CAAT
Penguji II



Mengetahui,
Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA
NIPY. 09.011.06

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL)” beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap karya tulis saya ini.

Tegal, 30 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Denis Setiawan
NIM 18030244

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama yang bertanda tangan dibawah ini , saya :

Nama : Denis Setiawan

NIM : 18030244

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL)”.

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikan karya ilmiah saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak program studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini,

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 30 Juli 2021

Yang membuat pernyataan.



Denis Setiawan
NIM.18030244

HALAMAN MOTTO

“Sungguh memprihatinkan, manakala banyak negara mulai menjadikan sejarah dalam menumbuhkan semangat kebangsaan, kita justru “berlari kencang” meninggalkan sejarah perjuangan bangsa. Bahkan, dengan “mata telanjang” tampak ada upaya keras untuk mencabut generasi penerus bangsa dari akar sejarah perjuangan bangsa Indonesia.”

(Dra. Tri Lestari, M.Pd)

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.”

(Ralph Waldo Emerson)

“Sistem pendidikan yang bijaksana setidaknya akan mengajarkan kita betapa sedikitnya yang belum diketahui oleh manusia, seberapa banyak yang masih harus ia pelajari.”

(Sir John Lubbock)

“Seberapa besar usahamu jika jalan yang ditakdirkan untukmu bukan lah itu, Sekuat apapun usahamu, Sesering apapun Doa yang kamu panjatkan. Suatu saat kamu akan ditemukan dengan kegagalan,”

(Denis Setiawan)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk :

1. Bapak Nizar Suhendra, SE., MPP selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ka.Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Bapak Andri Widiyanto, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing I.
4. Ibu Yusri Anis F, SE, M.Si, Ak, CA selaku dosen pembimbing II.
5. Kedua orang tua tercinta dan seluruh keluarga yang selalu memberi dukungan dan doa.
6. Teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi, semangat dan bantuan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidaya serta karunianya-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal” .

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.

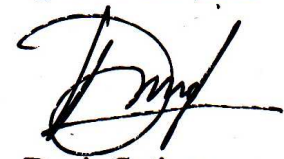
Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Nizar Suhendra, SE., MPP selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama .
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Ka.Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama
3. Bapak Andri Widiyanto. SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.
4. Ibu Yusri Anis F. SE, M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.
5. Para pejabat dan pegawai di lingkungan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, serta anggota DPRD yang telah membantu selama kegiatan penelitian ini.
6. Teman-teman baik di kampus, yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantu selesainya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan disana-sini. Oleh karna itu, penulis

memohon maaf atas segala kurang dan kelemahan yang ada. Akhirnya penulis sangat berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca serta pemerhati masalah akuntansi pada umumnya.

Tegal, 30 Juli 2021



Denis Setiawan
NIM. 18030244

ABSTRAK

Denis Setiawan 2021, program studi Politeknik Harapan Bersama, Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal. Pembimbing I : Andri Widiyanto, SE, M.Si, Pembimbing II : Yusri Anis F, SE, M.Si

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari laporan keuangan yang digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018-2020 jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, keserasian dan pertumbuhan pendapatan daerah. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukkan Rasio keserasian belanja modal pada tahun 2018 sebesar 14,10%, tahun 2019 mengalami penurunan dengan jumlah total sebesar 12,45% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 14,27%. Rasio kemandirian tahun 2018 sebesar 2,41%, selanjutnya rasio ketergantungan tahun 2019 mengalami kenaikan dengan nilai sebesar 3,32% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai sebesar 2,01%. Rasio pertumbuhan yang dihasilkan Kota Tegal tahun 2018- 2020 memiliki nilai tahun 2018 sebesar -1,75% tahun 2019 sebesar -2,55%; tahun 2020 sebesar 12%.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan, Analisis Rasio

ABSTRACT

Denis Setiawan 2021, Harapan Bersama Polytechnic Accounting study program, *Financial Ratio Analysis to Assess the Financial Performance of the Tegal City Government*. Supervisor I : Andri Widiyanto, SE, M.Si, Supervisor II : Yusri Anis F, SE, M.Si

Financial ratio analysis is a comparison between two numbers whose data is taken from financial statements that are used to interpret performance developments from year to year. To find out the financial performance of the Tegal City Government for the 2018-2020 fiscal year when viewed from the ratio of regional financial independence, compatibility and revenue growth area. The data analysis technique in this research is descriptive quantitative. The results of the study show that the capital expenditure compatibility ratio in 2018 was 14.10%, in 2019 it decreased by a total of 12.45% and in 2020 it increased by 14.27%. The independence ratio in 2018 was 2.41%, then the 2019 ratio increased by 3.32% and in 2020 it decreased by 2.01%. The growth ratio generated by the City of Tegal in 2018-2020 has a 2018 value of -1.75% in 2019 of -2.55%; in 2020 by 12%.

Keywords: *Financial Statements, Financial Performance, Ratio Analysis*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Batasan Penelitian	6
1.6. Kerangka Berpikir.....	6
1.7. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9

2.1. Analisis.....	9
2.2. Rasio Kemandirian Daerah	9
2.3. Rasio Keserasian	9
2.4. Rasio Pertumbuhan.....	10
2.5. Pendapatan Asli Daerah	10
2.6. Belanja Modal	11
2.7. APBD.....	11
2.8. Penelitian terdahulu	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
3.1. Lokasi Penelitian	16
3.2. Waktu Penelitian	16
3.3. Objek Penelitian	16
3.4. Jenis Data.....	16
3.5. Teknik Pengumpulan Data	17
3.6. Teknik Analisis Data.....	17
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Tegal.....	20
4.1.1. Sejarah Singkat Pemerintah Kota Tegal.....	20
4.2. Hasil Analisis Data	21
4.2.1. Deskripsi Data	21
4.2.2. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah.....	23
4.2.3. Hasil Perhitungan Rasio Keserasian.....	23
4.2.4. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan.....	24
4.3. Pembahasan	25
4.3.1. Rasio Kemandirian Daerah.....	25

4.3.2. Rasio Kerasian	26
4.3.3. Rasio Pertumbuhan.....	27
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	28
5.1. Kesimpulan	28
5.2. Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Berpikir.....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	17
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Kemandirian Daerah.....	25
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Kekeragaman Daerah.....	26
Table 4.4 Hasil Perhitungan Pertumbuhan.....	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 4.1	
Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tegal Th 2018-2020.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Nugraha, 2019) ^[1]. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintah oleh Pemerintahan Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila keempat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini terdapat pemisahan wewenang diantara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggaraan negara lainnya sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara negara. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan negara, pemerintah menyusun APBN atau APBD.

Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Meskipun laporan keuangan dibuat lebih umum dan sederhana agar mudah dipahami semua pihak, tetapi masih banyak yang belum memahami laporan keuangan dengan baik. Bahkan beberapa pihak sama sekali tidak tertarik dengan laporan keuangan. Hal itu wajar, karena beberapa pihak berasal dari latar belakang yang berbeda. Padahal semua pengguna laporan keuangan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. Untuk menganalisis laporan keuangan terdapat beberapa metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan (Mahmudi, 2019) ^[2].

Pemerintah daerah perlu menganalisis laporan keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menilai kinerja keuangan daerah yaitu dengan melakukan perhitungan rasio-rasio keuangan sehingga diperoleh hasil analisis rasio keuangan yang selanjutnya dapat dievaluasi, menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari laporan keuangan yang digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun (Mahmudi, 2019:90) ^[2].

Dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada APBD, pemerintah dapat mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur Rasio Kemandirian Daerah, Keserasian, dan Pertumbuhan daerah, mengukur kontribusi masing- masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat mengetahui pertumbuhan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Halim, 2007) ^[3].

Table 1.1 Sumber-sumber Pendapatan APBD Kota Tegal 2018-2020

Tahun	Sumber Pendapatan			Total Pendapatan Daerah
	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Lain-lain	Lain-lain PAD yang Sah	
2018	Rp 305,484,446,000	Rp 98,990,953,000	Rp 206,493,493,000	Rp 610,968,892,000
2019	Rp 297,677,322,000	Rp 100,998,192,000	Rp 192,679,130,000	Rp 591,354,644,000
2020	Rp 333,012,742,000	Rp 131,349,671,000	Rp 201,663,071,000	Rp 666,025,484,000

Sumber : APBD Kota Tegal 2018-2020

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Pemerintah Kota Tegal antara lain : (1) ketergantungan pemerintah daerah Kota Tegal terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi, selama kurun waktu 2018-2020 pendapatan transfer selalu mengalami peningkatan (2) rendahnya kemampuan daerah dalam mengelola dan menggali sumber- sumber pendapatan asli daerah (PAD) sehingga penerimaan pendapatan asli daerah relatif rendah jika dibandingkan dengan pendapatan transfer. Maka penulis mengambil topik penelitian dengan judul “ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL)”

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018-2020 yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018-2020 yang diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2018-2020 yang diukur dengan menggunakan rasio keserasian belanja modal?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018-2020 jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018-2020 jika dilihat dari rasio pertumbuhan.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018-2020 jika dilihat dari rasio keserasian belanja modal.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Peneliti
 - a. Sebagai studi perbandingan antara teori yang didapat di bangku kuliah dengan praktik yang ada dilapangan.
 - b. Menambah wawasan yang berkaitan dengan Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal.

2. Bagi Kota Tegal

Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meninjau penerapan konsepsi pelaksanaan penyusunan anggaran terkait dengan pelaksanaan kebijakan alokasi anggaran di Kota Tegal. Lebih lanjut diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi semua pihak dalam memahami kebijakan alokasi anggaran Kota Tegal semestinya menempatkan skala prioritas pengeluaran menjadi hal utama agar dana yang dialokasikan menjadi tepat sasaran.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

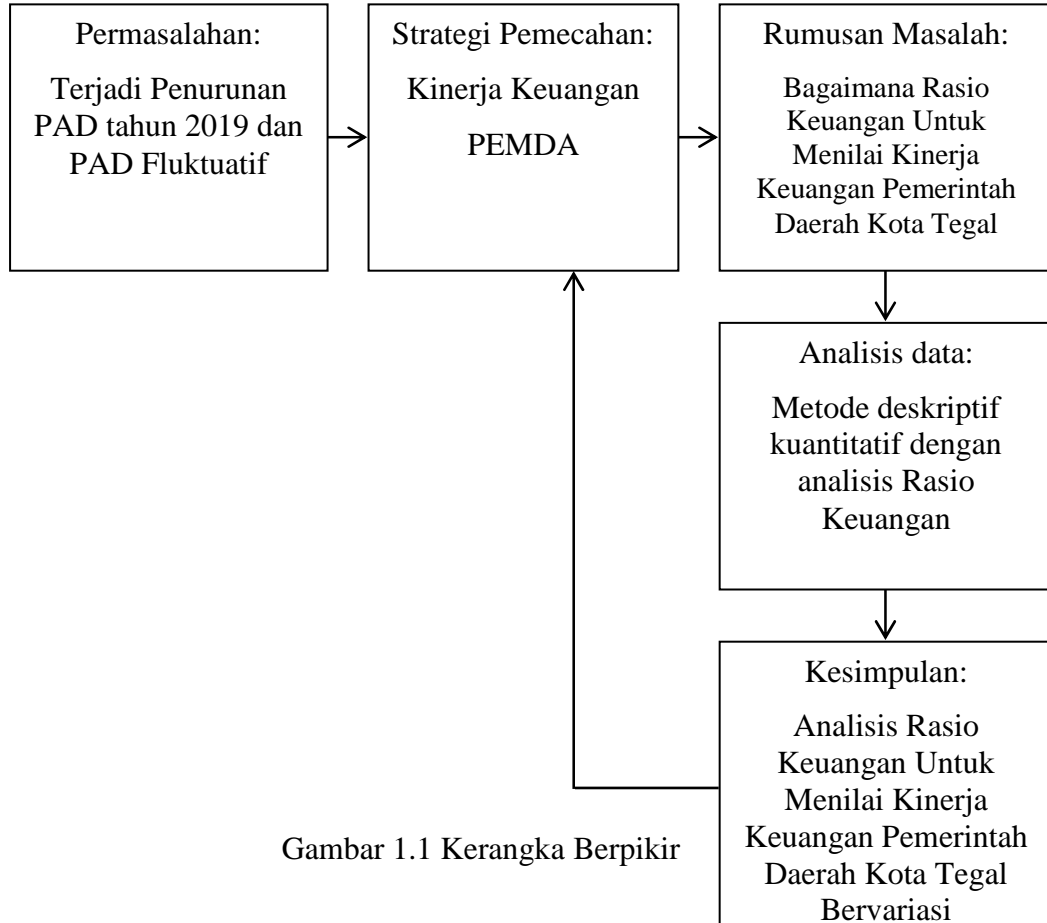
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah referensi kepustakaan di Politeknik Harapan Bersama Tegal, terutama di bidang Akuntansi.

1.5. Batasan Penelitian

Dalam penulisan ini, akan dilakukan tinjauan atas pengalokasian Rasio pada APBD Kota Tegal tahun anggaran 2018-2020 dianalisis dengan pendekatan Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan.

1.6. Kerangka Berpikir

Dalam menganalisis rumusan masalah tersebut, analisis yang digunakan yaitu metode analisis kuantitatif dengan analisis Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Keserasian. Kesimpulan sementara dan penelitian ini adalah Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal. Maka kerangka model penelitian dapat disajikan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan memudahkan jalan pikiran dalam memahami secara keseluruhan isi Tugas Akhir. Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian Pengantar Tugas Akhir, yang terdiri dari : Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Daftar Lampiran.
2. Bagian Umum Tugas Akhir, yang terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, perumusan masalah, batasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori yang berhubungan dengan akuntansi pemerintahan.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, obyek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan secara singkat hasil temuan lapangan yang terdiri atas sejarah berdirinya perusahaan, visi dan

misi perusahaan, dan struktur organisasi, Selain itu juga menguraikan tentang “ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL)”.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini berisi daftar pustaka Tugas Akhir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Analisis

Kamus besar bahasa Indonesia, Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Kamus akuntansi, Analisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.

2.2. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. tersebut (Mahmudi, 2019:140) ^[6]

2.3. Rasio Keserasian

Rasio kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

2.4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. *Definisi Growth menurut Fahmi (2014:82)* ^[7]

2.5. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

Secara garis besar Bastian (2006: 146) ^[8] menjelaskan bahwa pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari satu kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas lain yang merupakan operasi pokok atau utama yang berkelanjutan dari kesatuan tersebut.

Tujuan prosedur penyusunan pendapatan menurut Bastian (2006: 147) ^[9] adalah;

- a) memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai pendapatan, mulai dan pengakuan sampai pada proses pencatatannya.
- b) memberikan informasi yang tepat maupun prediktif mengenai jumlah pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (pemda), sehingga dapat diperhitungkan seberapa besar dana yang dimiliki oleh pemda untuk membiayai kegiatan pemda seperti yang dianggarkan.

2.6. Belanja Modal

Pengeluaran modal atau Belanja modal Capital expenditure atau Capital spending (Capex)) adalah alokasi uang yang direncanakan (dalam anggaran) untuk memperoleh aset tetap yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi seperti properti, pabrik, dan peralatan, tanah, gedung yang akan menjadi aset perusahaan. Aset-aset modal tersebut memiliki umur manfaat yang panjang dan berpengaruh pada peningkatan kapasitas produksi bisnis. Investasi dalam aset tetap memungkinkan bisnis meningkatkan produksi sehingga disebut juga belanja modal.

2.7. APBD

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006).^[11]

Sementara itu Mardiasmo (2002:11) .^[12] mengatakan, bahwa salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah yang tercermin dalam APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki porsi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan putusan dan perencanaan pembangunan serta alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang dan ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas pada berbagai unit kerja.

2.8. Penelitian terdahulu

Tabel 2.1

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Listiyani Natalia dan Tutut Dewi Astuti (2015)	Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah	Analisis varian pendapatan, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio efektivitas PAD, rasio keserasian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan di Pemerintah Kabupaten Sleman baik, dalam merealisasikan belanja daerahnya sudah efisien Namun ketergantungan pemerintah daerah

		Kabupaten Sleman	belanja, rasio efisiensi belanja, rasio Kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan Keuangan daerah	terhadap pemerintah pusat masih tinggi
2.	Anim Rahmawati (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013	Rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio DCSR.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan PAD sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah.
3	Heri Susanto (2019)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota	Rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio aktivitas dan pertumbuhan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio efektivitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio kemandirian

		Mataram		<p>pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktivitas kurang baik, rasio pertumbuhan PAD kurang baik, sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, untuk pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik karena porsi belanja operasi lebih besar dari belanja modal.</p>
4	Novira Sartika dan Adrian Irnanda Pratama (2019)	<p>Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016</p>	<p>Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio pertumbuhan</p>	<p>Analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Siak diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan sangat rendah, rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan efisien,, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan efektif. Rasio pertumbuhan menunjukkan kondisi fluktuasi.</p>

				<p>Rasio keserasian, terutama rasio pengeluaran operasional menunjukkan rata-rata 64,95% dan belanja modal 31,53%.</p>
--	--	--	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian berlokasi di Kota Tegal.

3.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Februari sampai dengan Juli 2021

3.3. Objek Penelitian

Penulis memfokuskan objek penelitian mengenai Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal tahun 2018 sampai 2020.

3.4. Jenis Data

Berdasarkan jenisnya, data dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi yang bukan dalam bentuk angka tetapi dalam bentuk lisan atau tulisan. (Sugiyono, 2007:13).^[13] Data tersebut dalam penelitian ini adalah Data pada Peraturan Walikota Tegal tentang informasi mengenai Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal.
- b) Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau data yang di angkakan. (Sugiyono, 2007: 13).^[13] Data tersebut dalam penelitian ini adalah data pada Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua cara penulis lakukan dalam pengumpulan data yaitu :

1) Dokumen

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data laporan Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal tahun 2018 sampai 2020.

2) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui peninjauan kepustakaan untuk membandingkan kenyataan di lapangan dengan teori sebenarnya. Data tersebut dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari literature tugas akhir sebelumnya, dan buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal, penulis menggunakan Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Keserasian, Dan Rasio Pertumbuhan yaitu:

1. Penelitian kuantitatif

Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2007: 13).^[13]

2. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang 4 berasal dari sumber yang lain (Mahmudi, 2019:140) ^[14] ..

Rasio Kemandirian Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi Dan Pinjaman}} \times 100\% \dots$$

Tabel 3.1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

- a. Pola hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri

dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

3. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian adalah rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Mahmudi, 2019:162-163)^[15] .

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \dots$$

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Halim, 2012)^[16] . Diketuinya pertumbuhan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Tegal

4.1.1. Sejarah Singkat Pemerintah Kota Tegal

Secara historis dijelaskan bahwa eksistensi dari Kota Tegal tidak lepas dari peran Ki Gede Sebayu. Bangsawan ini adalah saudara dari Raden Benowo yang pergi kearah Barat dan sampai di tepian sungai Gung. Melihat kesuburan tanahnya, Ki Gede Sebayu tergugah dan berniat bersama-sama penduduk meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan serta membuat saluran pengairan. Daerah yang sebagian besar merupakan tanah lading tersebut kemudian dinamakan Tegal. Selain berhasil memajukan pertanian, dia juga merupakan ahli agama yang telah membimbing warga masyarakat dalam menanamkan rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas jasanya tersebut, akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin dan panutan warga masyarakat. Kemudian oleh Bupati Pemasang dikukuhkan menjadi sesepuh dengan pangkat Juru Demung atau Demang. Pengangkatan Ki Gede Sebayu menjadi Pemimpin Tegal dilaksanakan pada perayaan tradisional setelah menikmati hasil panen padi dan hasil 36 pertanian lainnya. Perayaan tersebut tepat di bulan purnama tanggal 15 sapar tahun EHE 988 yang bertepatan dengan hari jumat kliwon 12 April 1580. Dalam perayaan juga dikembangkan ajaran dan budaya agama islam yang hingga sekarang masih berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Hari, tanggal dan tahun Ki Gede Sebayu diangkat menjadi Juru

Demung itu ditetapkan sebagai hari jadi Kota Tegal dengan peraturan Daerah No.5 tahun 1988 tanggal 28 Juli 1988Bagian umum

4.2. Hasil Analisis Data

4.2.1. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai seberapa besar Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Keserasian Pemerintah Daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020.

Berdasarkan hasil penelitian di Data Pemerintah Daerah Kota Tegal dapat diketahui data sebagai berikut :

4.2.1.1 Data Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tegal

Lampiran 4.1 Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2018-2020

NO		2018	2019	2020
	PENDAPATAN			
1.	Pendapatan Asli Daerah	305,484,446,000	297,677,322,000	333,012,742,000
	a. Pendapatan Pajak Daerah	74,656,813,000	77,550,464,000	93,763,370,000
	b. Hasil Retribusi Daerah	20,803,309,000	23,700,141,000	26,857,084,000
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	3,530,831,000	3,747,587,000	10,729,217,000
	d. Lain-lain PAD Yang Sah	206,493,493,000	192,679,130,000	201,663,071,000
2.	Bagian Dana Perimbangan	640,707,019,000	664,378,158,000	702,011,544,000
	a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	33,865,691,000	25,452,966,000	25,246,220,000
	b. Dana Alokasi Umum	482,150,715,000	502,969,026,000	512,935,790,000
	c. Dana Alokasi Khusus	124,690,613,000	135,956,166,000	153,175,243,000
	d. Dana Insentif Daerah	-	-	10,654,291,000
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	98,336,239,000	81,614,577,000	97,946,472,000
	a. Pendapatan hibah	27,882,288,000	27,259,800,000	27,248,597,000
	b. Dana Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	50,942,351,000	53,574,777,000	70,697,875,000
	c. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	-	-	-
	d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19,511,600,000	780,000,000	-
	e. Pendapatan lainnya	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1,044,527,704,000	1,043,670,057,000	1,132,970,758,000
II	BELANJA			
1.	Belanja Tidak Langsung	470,898,565,000	445,427,145,000	473,534,490,000
	a. Belanja Pegawai	444,453,620,000	429,547,689,000	445,609,082,000
	b. Belanja Bunga	-	-	-
	c. Belanja Hibah	23,408,261,000	12,842,772,000	20,555,841,000
	d. Belanja Bantuan Sosial	350,000,000	350,000,000	4,660,000,000
	e. Belanja Bantuan Keuangan	686,684,000	686,684,000	709,567,000
	f. Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
2.	Belanja Langsung	669,235,567,000	675,038,658,000	804,858,610,000
	a. Belanja Pegawai	110,933,297,000	107,220,501,000	94,430,134,000
	b. Belanja Barang dan Jasa	397,279,672,000	428,223,074,000	527,988,798,000
	c. Belanja Modal	161,022,598,000	139,595,083,000	182,439,678,000
	JUMLAH BELANJA	1,140,134,132,000	1,120,465,803,000	1,278,393,100,000
	SURPLUS / (DEFISIT)	(95,606,428,000)	(76,795,746,000)	(145,422,342,000)

III				
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	106,926,428,000	88,785,746,000	165,060,342,000
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	106,926,428,000	88,785,746,000	165,060,342,000
	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Inves	-	-	-
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11,320,000,000	11,990,000,000	19,638,000,000
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daer	11,320,000,000	11,990,000,000	19,638,000,000
	Pembayaran Utang Pokok	-	-	-
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daer	-	-	-
	(Investasi Non Permanen)	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	95,606,428,000	76,795,746,000	145,422,342,000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN			
	ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-

4.2.2. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah

Maka dapat dihitung Rasio Kemandirian daerah yang ideal. Adapun rumus Rasio Kemandirian daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi Dan Pinjaman}} \times 100\%$$

1. Tahun 2018

Analisis Rasio Kemandirian Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Rp.305.484.446.000}}{\text{Rp.126.438.028.000}} \times 100\% = 2,41\%$$

2. Tahun 2019

Analisis Rasio Kemandirian Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Rp.297.677.322.000}}{\text{Rp.89.565.746.000}} \times 100\% = 3,32\%$$

3. Tahun 2020

Analisis Rasio Kemandirian Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Rp.333.012.742.000}}{\text{Rp.165.060.342.000}} \times 100\% = 2,01\%$$

4.2.3. Hasil Perhitungan Rasio Kekeragaman

Maka dapat dihitung Kekeragaman belanja daerah yang ideal. Adapun rumus Kekeragaman:

$$\text{Rasio Kekeragaman} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

1. Tahun 2018

$$\text{Rasio Kekeragaman} = \frac{\text{Rp.161.022.598.000}}{\text{Rp.1.140.134.132.000}} \times 100\% = 14,10\%$$

2. Tahun 2019

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{\text{Rp.139.595.083.000}}{\text{Rp.1.120.465.803.000}} \times 100\% = 12,45\%$$

3. Tahun 2020

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{\text{Rp.182.439.678.000}}{\text{Rp.1.278.393.100.000}} \times 100\% = 14,27\%$$

4.2.4. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan

Maka dapat dihitung Rasio Pertumbuhan daerah yang ideal. Adapun rumus Rasio Pertumbuhan:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

1. Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan} &= \frac{\text{Rp.305.484.446.000} - \text{Rp.310.927.508.000}}{\text{Rp.310.927.508.000}} \times 100\% \\ &= -1,75\% \end{aligned}$$

2. Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan} &= \frac{\text{Rp.297.677.322.000} - \text{Rp.305.484.446.000}}{\text{Rp.305.484.446.000}} \times 100\% \\ &= -2,55\% \end{aligned}$$

3. Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan} &= \frac{\text{Rp.333.012.742.000} - \text{Rp.297.677.322.000}}{\text{Rp.297.677.322.000}} \times 100\% \\ &= 12\% \end{aligned}$$

4.3. Pembahasan

4.3.1. Rasio Kemandirian Daerah

Dari perhitungan analisis rasio kemandirian daerah Kota Tegal dapat terlihat pada tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2

Hasil Perhitungan kemandirian daerah

No	Tahun	Presentase Kemandirian	Keterangan
1	2018	2,41%	Rendah Sekali
2	2019	3,32%	Rendah Sekali
3	2020	2,01%	Rendah Sekali

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 4.2 dapat dilihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah untuk Pemerintah Daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018 – 2020 menunjukkan kondisi keuangan yang fluktuatif (Naik Turun). Rasio kemandirian tahun 2018 sebesar 2,41%, selanjutnya rasio ketergantungan tahun 2019 mengalami kenaikan dengan nilai sebesar 3,32% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai sebesar 2,01%.

4.3.2. Rasio Kecerasian

Dan perhitungan analisis rasio Kecerasian daerah Kota Tegal dapat terlihat pada tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel 4.3

Hasil Perhitungan Kecerasian Daerah

No	Tahun	Presentase Kecerasian
1	2018	14,10%
2	2019	12,45%
3	2020	14,27%

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 4.3 dapat dilihat bahwa rasio kecerasian belanja modal untuk Pemerintah Daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018 – 2020 menunjukkan hasil yang fluktuatif. Rasio kecerasian belanja modal pada tahun 2018 sebesar 14,10%, selanjutnya rasio kecerasian belanja modal pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan jumlah total sebesar 12,45% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 14,27%. Jika dilihat dari rata-rata rasio kecerasian belanja modal di Pemerintah Daerah Kota Tegal tahun 2018 – 2020 sebesar 13,61% .

4.3.3. Rasio Pertumbuhan

Dan perhitungan analisis rasio Keserasian daerah Kota Tegal dapat terlihat pada tabel 4.4 sebagai berikut

Tabel 4.4

Hasil Perhitungan Pertumbuhan Daerah

No	Tahun	Presentase Keserasian
1	2018	-1,75%
2	2019	-2,55%
3	2020	12%

Hasil analisis yang diperoleh pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dengan melihat rasio pertumbuhan yang dihasilkan Kota Tegal tahun 2018-2020 memiliki nilai tahun 2018 sebesar -1,75% tahun 2019 sebesar -2,55%; tahun 2020 sebesar 12%. Pada tahun 2018 rasio pertumbuhannya dapat dikatakan cukup tinggi mencapai 12%; akan tetapi antara 2018-2019 mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan mencapai tahun 2018 sebesar -1,75%; tahun 2019 sebesar -2,55%. Berdasarkan tabel 4.4 rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 2,60% dari tahun 2018-2020

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah disajikan pada bab sebelumnya.

1. Rasio keserasian belanja modal pada tahun 2018 sebesar 14,10%, tahun 2019 mengalami penurunan dengan jumlah total sebesar 12,45% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 14,27%. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.
2. Rasio kemandirian tahun 2018 sebesar 2,41%, selanjutnya tahun 2019 mengalami kenaikan dengan nilai sebesar 3,32% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai sebesar 2,01%. Pola hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah
3. Rasio pertumbuhan yang dihasilkan Kota Tegal tahun 2018- 2020 memiliki nilai tahun 2018 sebesar -1,75% tahun 2019 sebesar -2,55%; tahun 2020 sebesar 12%. Semakin besar presentase pertumbuhan semakin besar pula pertumbuhan di daerah tersebut. dan semakin kecil presentase pertumbuhannya maka pertumbuhan di daerah tersebut juga kecil.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah

1. Pemerintah Kota Tegal diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga akan mampu meningkatkan kemandirian daerah Kota Tegal.
2. Sebaiknya Pemerintah Kota Tegal lebih proporsional di dalam mengalokasikan belanjanya dengan meningkatkan belanja modal. Ini dilakukan untuk memperbaiki ketiga rasio.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan ada penambahan periode dan variabel yang semakin panjang agar lebih akurat dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal. Perluas ruang lingkup Wilayah penelitian agar mampu membandingkan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain di Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Nugraha, (2019). *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jawa Tengah: TribunJateng.com.
- 2) (Mahmudi, 2019:90). *menganalisis laporan keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- 3) Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat: Kinerja Keuangan Daerah
- 4) Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* .
- 5) Fahmi (2014:82) *Definisi Growth*.
- 6) Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- 7) Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- 8) Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- 9) Bastian (2006: 147) *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan.*
- 10) Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* . Yogyakarta: Penerbit Erlangga
- 11) (Permendagri No.13 Tahun 2006) *rencana keuangan tahunan daerah*.
- 12) Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Edisi Pertama).
- 13) Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.

- 14) Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- 15) Margarita, L. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014-2018. *Skripsi* . Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pancasakti Tegal.